

Negara Jangan Sampai Coba Menyaingi Tuhan

Waruno Mahdi

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sudah beberapa minggu masuk berita terus dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Sungguh satu contoh partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang amat menggembarakan.

Perhatian masyarakat untuk isu pornografi ini lumrah. Kawasan Asia makin berkembang teknik dan industrinya; penduduk sampai di pelosok pedalaman tidak lagi terisolasi dari dunia moderen. Tetapi bersama keringanan yang didatangkan teknik mutakhir bersama alat komunikasi dan teknologi informasinya, terjadi berbagai gejala kebudayaan yang dirasa merongrong adat dan santun tradisional. Sedangkan segi-segi tertentu yang dalam masyarakat tradisional sudah ada, tetapi tidak begitu ditonjolkan, itu tidak lagi tersembunyi di balik tabir. TV dan internet membeberkannya terang-terangan tanpa mengenal malu.

Masyarakat tradisional sudah semestinya cemas dan menaruh harapan besar bahwa RUU APP ini bisa membendung apa yang diperhatikannya sebagai proses perusakan moral. Sesungguhnya sudah cukup banyak suara dari pihak ahli yang lebih kenal dengan seluk-beluk penanganan masalah moral dalam dunia modern, yang waswas, memperingati bahwa problemnya tidak dapat ditanggulangi dengan UU APP yang dirancangan itu, karena efeknya yang positif akan sangat kecil dibandingkan dengan efek yang negatif.

Selain akibat negatif yang relatif gamblang, ada yang tersamar yang justru lebih berbahaya. Di antara yang cukup gamblang, pengaturan dan pembatasan kebebasan berpakaian tak mungkin secara universal mengindahkan adat berpakaian segenap bunga rampai sukubangsa bhinneka tunggal ika ini. Akibatnya bisa mengganggu kekompakan Negara Kesatuan RI. Selain bisa bentrok dengan pakaian daerah, pasti juga berbentrok dengan pakaian khusus berjenis-jenis olahraga. Kalau yang dibatasi itu pakaian satu jenis kelamin saja, misalnya perempuan, maka selain melanggar Pasal 27 ad 1 Undang-undang Dasar (Segala warga negara bersamaan kedudukannya ...) itu juga menutup akses perempuan ke sejumlah bidang olahraga.

Pelarangan pornografi pun ada ekor-ekornya, karena internet tidak bisa disensor. Dengan UU APP pun orang yang mau melihat gambar cabul cukup dengan mendatangi warung internet, kalau tidak punya komputer di rumah. Tetapi masalahnya masih jauh lebih gawat dari itu.

Di Amerika Serikat dari tahun 1920 sampai 1933 berlaku perundang-undangan "Prohibisi Nasional terhadap Alkohol". Tujuannya memperbaiki moral dan kesehatan umum serta mengurangi kriminalitas dan korupsi. Tetapi hasilnya ternyata sebaliknya, produksi dan konsumsi alkohol setelah beberapa waktu justru bertambah, tetapi sepenuhnya ilegal, sehingga kriminalitas turut membumbung tinggi, begitupun jumlah penduduk yang kesehatannya rusak. Tetapi akibat paling runyam: dalam periode prohibisi itu kelompok kriminal terorganisasi sempat mengkonsolidasi diri, mengeruk laba luarbiasa dari dagang alkohol, dan menimbun modal raksasa untuk lepas-landasnya mafia "Cosa Nostra" yang sampai sekarang tidak berhasil diberantas.

Sudah pasti, berbagai pelarangan terhadap pornografi, kecabulan dan kepelacuran tidak akan bisa meniadakan hukum "demand and supply" di bidang itu, melainkan sekadar mengubah sumber dan jalan distribusi. Yang paling untung dalam hal ini ber-

Semula disiarkan di internet di beberapa milis pada tgl. 10 April 2006, kemudian ditayangkan online pada tgl. 4 April 2010.

bagai anasir kriminal yang cergas dan gesit menyediakan “bahan” seperlunya itu bagi “konsumen”-nya. Mereka akan mengeruk laba besar-besaran untuk kemudian memodali kegiatan kriminal yang lebih merusak, misalnya perdagangan narkotik dan penyogokan sementara pejabat.

Perlu dikhawatirkan, sejumlah produsen di dalam negeri akan bangkrut, yang untung malah produsen luar negeri. Ini pernah diuji pada awal dasawarsa 1960-an: Waktu itu ada usaha pemerintah melarang filem porno, begitupun apa yang dinamakan “musik ngak-ngik-ngok”. Tetapi ternyata di kamar belakang rumah pembesar lancar terus pertunjukan filem cabul yang malah lebih jorok lagi, yang diselundup masuk dari Hongkong, sedangkan lagu-lagu pop tetap laris terus. Maka kalau artis dan seniman Indonesia sekarang dikekang kemungkinannya “bertunjuk”, akan kalah saing dengan Bollywood, Hongkong, dll., jangan-jangan juga dengan rekaman tari perut dari Kairo atau Istanbul. Uang yang mestinya hinggap pada pelaku, produsen dan teknisi dalam negeri itu malah hanyut ke mancanegara.

Bersama itu moral umum bukannya membaik, malah lebih merosot karena produksi asing mustahil menaati segi-segi tertentu kepribadian bangsa Indonesia. Aparat negara yang seberapa kuatnya, bahkanpun yang kebal korupsi, tidak akan sanggup menjamin undang-undang ditaati. Dulu waktu Rusia masih negeri komunis, aparatnya yang begitu ketat sajumpun tidak sanggup mencegah penduduknya menggemari musik dan pakaian barat. Tidak sekali saja saya sendiri menyaksikan pemudi memelacurkan diri kepada orang asing demi sepasang kaos kaki nylon.

Sesungguhnya, berbagai bentuk kesenian yang cabul itu sudah ada sepanjang sejarah, baik yang didatangkan dari luar (India, Kalifat Bagdad), maupun yang dari sumber pribumi. Akhir abad ke-16, musafir Eropa di Malaka terpesona oleh pantun Melayu yang penuh asmara berahi. Sampai abad ke-19 di pulau Jawa di daerah yang belum diatur administrasi kolonial pun beredar berbagai ragam sastra cabul. Tetapi dulu, lapisan elite ningrat yang punya akses kepada yang demikian itu relatif kecil, dan segalanya itu umumnya berwatak eksklusif dan tertutup. Baru dengan makin luasnya peran lapisan madani dalam kehidupan ekonomi di satu pihak, dan makin efektifnya teknik komunikasi dan fasilitas pemasaran moderen di pihak lain (yang semuanya sama menjadi faktor vital pembangunan nasional), maka persediaan berbagai rupa karangan, pelukisan dan pertunjukan yang merangsang itu terbuka untuk sorotan mata umum. Timbullah kesan bahwa jumlah dan macamnya tambah banyak, atau wataknya tambah sesat.

Tetapi kalau diperhatikan benar perbandingan antara jumlah oknum yang membaca/menonton dengan luas seluruh lingkungan yang punya akses, maka yang sekarang belum tentu lebih tinggi daripada yang dulu. Mungkin malah berkurang, karena hal yang terbuka dan tidak terlarang itu lambat laun membosankan. Malah yang dilarang itu yang membuat orang iseng tertarik. Lebih bahaya lagi akibatnya terhadap orang remaja. Anak yang tengah memasuki usia akil balig sudah alamiah kalau besar perhatiannya kepada soal kelamin, dan bersama itupun luarbiasa cergas mencari bahan yang bukan-bukan mengenai tema tersebut.

Dalam masyarakat tradisional, bahan itu cukup terbatas, dan proses pengenalan dengannyapun terkendalikan. Dalam dunia moderen dengan teknik komunikasi yang mutakhir ini, situasinya sudah lain. Dalam keadaan ini, penting sekali kalau proses pengenalan anak-anak dengan masalah itu sedapat mungkin terbuka, sehingga memberi kesempatan kepada orang tua, wali, guru, dan sebagainya untuk memberi bimbingan dan petuah seperlunya, dan menghalau ekseseks sesat. Larangan, bahkanpun secara undang-undang, pasti tidak mencegah anak-anak itu mendapatkan apa

yang dicarinya. Hanya kita saja yang tidak tahu. Sekitar tahun 1960, sebelum ada internet sajakun, murid sekolah-sekolah bruder (Katolik) pada dilarang menonton filem Italia “La Dolce Vita”. Tetapi dari yang saya kenal, banyak yang sempat menyelusup masuk bioskop memelototi bintang filem Anita Ekberg yang tampil di filem itu. Belakangan semuanya besar menjadi orang beres, beristeri dan punya anak. Mungkin, di antara yang patuh karena kecut hatilah ada yang malah “tidak menjadi”.

Dipandang sepintas lalu, keadaan yang sekarang ini bisa mengkhawatirkan, dan orangpun bertanya: “Bagaimana dunia ini tidak sesat kalau orang bebas lantang berbuat cabul?” Sesungguhnya, tak beda dengan anak yang memelototi Anita Ekberg kemarin, masyarakat umumnya tabah budinya, tidak langsung rusak oleh beberapa tontonan nakal. Ada satu-dua yang menjadi korban. Kalau ada larangan undang-undangpun akan demikian, jumlahnya yang rusak bisa bahkan lebih besar.

Tetapi orang pun insaf, tidak seorang di antara semuanya itu bisa luput, pada satu saat berpulang, menghadap ke muka rahmat-Nya yang satu-satunya hakim mutlak sah dan adil, yang tidak bisa disogok dan tidak bisa ditipu. Penguasa duniawi tidak senonohnya mencoba mendahului-Nya, memperadili suatu masalah abstrak yang semata-mata berkaitan dengan moral dan hati nurani. Itu malah lebih banyak merusak.

— — — —